

POLITIK DAN TRADISI: POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

POLITICS AND TRADITIONS: MONEY POLITICS IN VILLAGE HEAD SELECTION

Magda Ilona Dwi Putri¹, Nahdia Arifani², Dela Ratnasari³,
Maurelia Vidiara Auliavia⁴, Sinta Nuriyah⁵, Agus Mahfud Fauzi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang Gedung i7 Surabaya, Indonesia

Email: ¹magda.17040564039@mhs.unesa.ac.id, ²nahdia.17040564042@mhs.unesa.ac.id,
³dela.17040564043@mhs.unesa.ac.id, ⁴maurelia.17040564063@mhs.unesa.ac.id,
⁵sinta.17040564072@mhs.unesa.ac.id, ⁶agusmfauzi@unesa.ac.id

Abstrak – Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat seperti yang terjadi di Desa Kedungjati. Masyarakat Desa Kedungjati memiliki ikatan yang kuat sehingga mengenal calon kepala desa. Namun faktanya, kecurangan masih sering dijumpai salah satunya adalah praktik politik uang. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tindakan rasional masyarakat Desa Kedungjati mengenai penerimaan politik uang. Pemilihan calon Kepala Desa Kedungjati dimenangkan oleh calon dengan politik uang paling sedikit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Kedungjati yang menerima politik uang saat pemilihan Kepala Desa Kedungjati sedang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan masyarakat Desa Kedungjati menerima politik uang didasari oleh tindakan rasional tujuan. Masyarakat menganggap politik uang sebagai tradisi. Masyarakat Desa Kedungjati akan datang ke TPS dengan membawa uang saku atau uang pemberian calon. Politik uang diterima karena anggapan bahwa menolak rejeki bukanlah hal yang baik. Sejak awal masyarakat telah mengetahui adanya motif dan tujuan dari calon. Namun di sisi lain, masyarakat telah memiliki kriteria calon sendiri tanpa paksaan dari politik uang.

Kata Kunci: Demokrasi; Motif; Pemilu; Politik uang; Tradisi

Abstract – The election of the village head is a democracy celebration for such communities as that in Kedungjati Village. The people of Kedungjati Village have strong ties among themselves so they know the prospective village head on a personal level. However cheating is still often encountered, one of whose elements is the practice of money politics. This study aims to explain the rational actions of the people of Kedungjati Village regarding the acceptance of money politics. The previous election of the candidate for Village Head of Kedungjati was won by the candidate with the least encounters of money politics. This study uses a qualitative approach with observations and interviews. The subjects of this research are the people of Kedungjati Village who accepted money politics when the election for the Village Head of Kedungjati was in progress. The results showed that the act of accepting bribes was based on a utilitarian mindset. People consider money politics as a tradition. The people of Kedungjati Village will come to the TPS with saku money or money given by the candidates. Money politics is accepted because of the assumption that rejecting luck is not a good thing. Since the beginning, the community has known the motives and goals of the candidates. But on the other hand, society has its own criteria for candidates without coercion put in effect by money politics.

Keywords: Democracy, Elections; Money politics; Motives; Traditions

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi. Secara sederhana, masyarakat memahami demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu bentuk demokrasi di negara Indonesia diwujudkan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan oleh rakyat

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Konsep pemilu tercipta dari gagasan demokrasi yang berarti kebebasan, keadilan dan persamaan individu dalam segala bidang (Nadir, 2018). Pemilihan umum dilakukan untuk memilih pemimpin mulai dari presiden, kepala daerah,

hingga kepala desa. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa diserahkan kepada setiap pemerintahan desa karena desa memiliki hak otonomi dalam bidang politik dan pemerintahan.

Pemilihan umum juga dikenal dengan sebutan pesta demokrasi (A. M. Fauzi, 2018). Pemilihan umum tidak persaingan di antara calon pasangan yang mengikuti kontestasi. Penyelenggaraan pemilihan umum juga dapat meningkatkan suhu politik di tengah masyarakat yang memiliki hak pilih. Perebutan kekuasaan nampak jelas ditandai dengan perang dingin di antara kubu pendukung.

Pemilihan Umum di Indonesia bertujuan memilih seseorang untuk jabatan politik tertentu. Pemilu dilakukan untuk jabatan eksekutif, legislatif pada setiap tingkat pemerintahan hingga pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa menjadi salah satu pemilihan umum yang sengit karena kursi sebagai kepala desa diperebutkan oleh beberapa orang. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan pusat untuk memberikan dana desa sebesar satu milyar. Kebijakan tersebut menjadi pemikat kedudukan sebagai kepala desa.

Pemilihan kepala desa seringkali diwarnai berbagai pelanggaran. Salah satu pelanggaran dalam pemilihan umum yang marak terjadi adalah politik uang. Pemilik hak pilih pada pemilihan kepala desa semestinya berbeda dengan pemilik hak pilih pada pemilu lain. Idealnya, masyarakat desa memiliki ikatan yang kuat sehingga mengenal calon kepala desa yang terlibat dalam kontestasi politik. Dengan mengenal calon kepala desa, mereka mampu menentukan pilihan tanpa menerima politik uang.

Calon kepala desa melakukan praktik politik uang sebagai upaya mempengaruhi pilihan dari pemilih (A. M. Fauzi, 2018). Calon kepala desa meyakini bahwa politik uang masih dianggap efektif untuk memenangkan kontestasi politik (A. M. Fauzi, 2018). Hal ini sejalan dengan pernyataan Pettalolo, Komisioner Bawaslu bahwa politik uang tidak mengalami penurunan justru semakin bertambah (Liputan6.com, 2020).

Terhadap praktik politik uang di desa hingga saat ini belum ada keputusan sanksi bagi pelaku (S. Agustin, 2019). Ketiadaan sanksi politik uang di desa memberi celah bagi calon kepala desa melakukan politik uang dalam kontestasi politik (Ismawan, 1999). Bahkan saat ini politik uang dilakukan dengan bentuk yang semakin beragam (Liputan6.com, 2020). Calon kepala desa melakukan perubahan bentuk politik uang dengan memberi barang kepada pemilik hak suara.

Pemberian yang dilakukan dapat berupa sembako hingga pakaian. Sembako yang diberikan meliputi beras, minyak, gula dan sebagainya (A. Fauzi, Sudrajat, Affandi, & Raditya, 2018).

Dalam upaya mencegah politik uang dalam pemilihan kepala desa, Pemerintah Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang memasang lima belas Closed Circuit Television. CCTV tersebut dipasang di beberapa Tempat Pemungutan Suara sebagai salah satu langkah preventif. Erwin, Kepala Desa Kepatihan mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap pelanggaran selama masa pemilihan umum. Pemasangan CCTV merupakan bentuk antisipasi praktik politik uang atau yang disebut serangan fajar. Pemasangan CCTV juga dikoordinasikan dengan pihak keamanan dan Panitia Pengawas Desa dan Panitia Pemungutan Suara (Syafii, 2019).

Pada tanggal 4 Desember 2019 telah dilaksanakan Pilkades serentak di Kabupaten Jombang. Setiap desa diwarnai dengan isu politik uang termasuk di Desa Kedungjati, Kecamatan Kabuh. Politik uang dianggap wajar dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa dan politik uang menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Pada periode ini terdapat empat calon kepala desa di Desa Kedungjati yang masing-masing melakukan politik uang. Mereka memberi uang atau sembako dengan nominal beragam. Mereka juga memberi dengan cara yang berbeda-beda.

Namun politik uang yang terjadi tidak diproses secara hukum. Masyarakat juga menerima bahkan merasa diuntungkan dengan hal tersebut. Warga menerima pemberian dari setiap calon kepala desa. Berdasarkan hasil pemungutan suara, pemenang pilkades bukanlah calon kepala desa yang melakukan politik uang dengan nominal terbesar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tindakan rasional masyarakat penerima politik uang dalam menyalurkan hak pilihnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan rasional penerima politik uang di Desa Kedungjati, Kec. Kabuh, Kab. Jombang. Tindakan rasional atau tindakan sosial merupakan hasil pemikiran Max Weber yang berorientasi pada motif dan tujuan pelaku.

Fenomena politik uang merupakan isu menarik, dan banyak mendapat perhatian para peneliti untuk meneliti dan mengkaji dari berbagai sudut pandang. Salah satu penelitian terdahulu berjudul "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa" dilakukan oleh Mohamad Amanu (Amanu, 2015).

Penelitian bertujuan untuk menggambarkan praktik-praktik politik uang, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Penentuan informan menggunakan teknik purposive dan *snowball*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang digunakan melalui tim sukses. Tim sukses akan melakukan kampanye yang kemudian menjanjikan mengenai pembangunan infrastruktur dan ziarah wali lima.

Penelitian selanjutnya berjudul “Cara Kerja Politik Uang” oleh Fitriyah (Fitriyah, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik politik uang pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Pati. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesamaan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa. Salah satu kesamaan terjadi ketika uang itu didistribusikan. Pendistribusian uang tersebut merupakan tanggung jawab operator lapangan yaitu staf kampanye.

Selanjutnya penelitian berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cemaga Selatan Kec Bunguran Selatan Kab Natuna tahun 2013” oleh Siswandi (Siswandi, 2016). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai politik uang. Masyarakat menganggap politik uang adalah hal yang umum untuk mempengaruhi suara kandidat yang tepat kepala desa rakyat. Menggunakan pendekatan kualitatif. Persepsi menurut Robbins terbagi dua Positif dan Negatif. Masyarakat Cemaga Selatan ini tergolong dalam persepsi positif. Masyarakat memiliki pemikiran positif terhadap politik uang yang dibagikan calon jika calon tersebut ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena jika calon tidak menggunakan uang untuk dibagikan kepada masyarakat, maka calon tersebut tidak akan menang dalam pemilu.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana rasionalitas penerima politik uang di Desa Kedungjati. Berdasarkan observasi di Desa Kedungjati terdapat fenomena praktik politik uang pada pemilihan kepala desa yang justru memenangkan orang yang melakukan politik uang yang jumlahnya lebih sedikit. Politik uang sendiri merupakan pemberian uang pada seorang pemilih yang dilakukan dengan sengaja oleh kandidat atau bakal pemimpin guna untuk memilihnya (Sumartini, 2004).

Bentuk politik uang pun beragam mulai dari

uang cash, sembako serta fasilitas umum (Umam, 2006). Fasilitas umum ini dibuat agar masyarakat melihat dengan nyata bakal calon yang akan memimpin daerahnya sehingga masyarakat yakin bahwa janji bakal calon akan terealisasi dengan baik. Hal tersebut dilakukan guna mengambil hati masyarakat, seolah-olah calon sangat mengerti apa yang diinginkan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini masyarakat kehilangan daya pikir kritisnya karena telah diberi sesuatu yang membuat lupa apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat mempertukarkan suaranya dengan materi. Tanpa berpikir panjang terkait masa depan desa selama enam tahun ke depan (R. S. Agustin, 2018).

Politik uang juga bisa diartikan sebagai suatu upaya guna mempengaruhi orang lain. Pengaruh tersebut digunakan untuk memilih calon yang memberikan suatu imbalan. Ada juga yang mengartikan bahwa ada semacam jual beli suara dalam proses pemilihan politik mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara (Ismawan, 1999). Hal tersebut menunjukkan bahwa politik uang terjadi di setiap tingkat kepemimpinan. Dengan kata lain, politik uang dianggap mempunyai daya pengaruh yang luar biasa.

Politik uang biasanya dilakukan oleh seorang kandidat dalam suatu proses pemilihan. Bentuk politik uang beragam mulai dari uang tunai, sembako dan fasilitas umum (Umam, 2006). Hal ini biasanya dilakukan ketika kampanye dengan cara meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, sticker, kaos dan lain sebagainya (Sumartini, 2004) (Ayuningtyas, 2019).

Praktik politik uang mendapat pengaruh yang besar dari tingkat pendidikan masyarakat (Mugiono, 2015). Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin rendah praktik politik uang. Masyarakat perkotaan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Umumnya masyarakat perkotaan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi sehingga mereka terbuka akan teknologi dan informasi (Wismabrata, 2019).

Lain halnya dengan masyarakat pedesaan yang masih tertutup akan sebuah perubahan dan tidak sedikit orang yang masih belum dapat beradaptasi dengan majunya teknologi dan informasi. Hal tersebut merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dalam pemilu (R. S. Agustin, 2018). Dengan kata lain, masyarakat pedesaan memiliki pandangan yang sempit dalam

dunia politik (Nuratika, 2015).

Landasan analisis dalam penelitian ini akan menggunakan teori rasionalitas atau tindakan sosial Max Weber yang berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Teori ini dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda. Analisa Weber melihat ini menjadi satu kesatuan yang membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau makna (Umanilo, 2008).

Weber menggunakan konsep rasionalitas dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan rasional adalah tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu lain dalam masyarakat. Weber membagi tindakan rasional ini kepada empat jenis atau bentuk. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya (Afif, 2015). Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak. Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: tindakan tradisional, tindakan afektif, rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai (Muhlis & Norkholis, 2016).

Rasionalitas instrumental dilakukan sesuai dengan kemampuan individu maupun kelompok yang terkait. Rasionalitas nilai dilakukan sesuai dengan makna, serta sejauh mana hal tersebut berharga dan harus dilakukan. Rasionalitas afektual dilakukan dengan adanya gengsi sosial dan kecemburuan antar individu maupun kelompok. Sedangkan tindakan tradisional dilakukan sesuai dengan apapun yang dianggap sakral dan bermakna.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi. Kegiatan dilakukan pengamatan untuk memperoleh data awal mengenai masalah yang dikaji. Lokasi penelitian dipilih wilayah Desa Kedungjati, Kabuh, Jombang dan dilaksanakan sejak Bulan Februari hingga Maret 2020.

Berdasarkan data awal dilakukan pengumpulan data tahap kedua yang lebih terfokus pada masalah yang diangkat. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam agar data yang diperoleh lebih mendalam. Kegiatan wawancara dilakukan di bulan Maret 2020.

Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat dengan mudah melakukan pengembangan pertanyaan pada informan secara spontan. Penggalan data akan lebih mendalam karena kemungkinan informan memberikan data yang tak terduga. Informan yang dipilih adalah masyarakat Desa Kedungjati yang menerima politik uang pada proses pemilihan kepala Desa Kedungjati, Kabuh, Jombang, berusia 40-50 tahun, telah melakukan pemilihan kepala desa minimal tiga kali.

Teknik analisis data yang digunakan sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Miles & A.M., 2009). Oleh karena itu dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan mendeskripsikan mengenai politik uang dalam pemilihan kepala Desa di Desa Kedungjati, Kabupaten Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kedungjati, Kecamatan Kabuh, kabupaten Jombang, merupakan desa yang masyarakatnya memiliki toleransi yang masih cukup tinggi. Hal tersebut di tunjukkan dari adanya bangunan tempat ibadah yang berjumlah 19, yang terdiri dari empat bangunan masjid, 14 bangunan langgar, dan satu gereja Kristen Protestan. Bangunan tempat ibadah masjid berjarak kurang lebih 190 m dengan gereja.

Desa Kedungjati memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 870, yang terdiri dari 2.682 penduduk sebanyak 1.314 penduduk laki-laki dan 1.368 penduduk perempuan. Terdapat 10 jenis lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari PKK, RW, RT, Karang Taruna, Kelompok Tani, BUMDes, organisasi perempuan, organisasi pemuda, organisasi bapak, dan yayasan. Sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani tanaman pangan dan juga kurang lebih setengah dari petani tersebut memiliki lahan yang cukup luas.

Latar Belakang Calon Kepala Desa Kedungjati
Tabel 1, menjelaskan gambaran latarbelakang calon kepala desa di Desa Kedung Jati.

KN merupakan Calon yang berasal dari kubu

Tabel 1. Latar Belakang Calon Kepala Desa Kedungjati

No.	Nama	Latar Belakang
1.	KN	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa periode sebelumnya • Merupakan seorang petani • Memiliki citra buruk yaitu kinerja yang kurang baik selama menjabat dan juga terlibat perselingkuhan dengan beberapa wanita
2.	SN	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan seorang wanita • Merupakan lulusan sarjana • Berasal dari keluarga yang cukup • Kurang dekat dengan warga desa
3.	SU	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki tingkat pendidikan yang rendah • Mantan Bandar judi dan penyalang ayam • Merupakan pribadi yang ramah dan loyal kepada warga desa
4.	NI	<ul style="list-style-type: none"> • Berasal dari Dusun Bogo • Kurang dikenal oleh warga

petahanan. Beliau merupakan kepala desa periode sebelumnya. Warga sudah memiliki gambaran dengan kepemimpinannya. Warga memiliki penilaian yang agak kurang baik terkait KN. KN yang juga bekerja menjadi petani tersebut dirasa warga tidak memiliki kinerja yang baik. Beberapa informan mengatakan bahwa banyak sekali berita buruk yang tersebar di kalangan warga desa terkait dengan KN. Beberapa berita yang tersebar salah satunya adalah kabar perselingkuhannya dengan beberapa wanita. Sehingga warga menilai bahwa KN memiliki perilaku yang buruk.

Calon kedua adalah SN. Calon ini merupakan orang yang baru bagi warga. Beberapa warga kurang memahami calon ini. SN dikenal tidak terlalu sering terlihat bersama dengan warga. Warga mengatakan bahwa SN seringkali memilih dengan pergaulannya. Sehingga SN dinilai kurang dapat berbaur dengan warga. Terutama bagi warga yang berasal dari kalangan bawah. Namun, latar belakangnya yang pernah menempuh pendidikan sarjana juga menjadi hal yang penting. Jika melihat calon – calon lainnya SN tentunya lebih unggul karena calon lainnya rata – rata menempuh pendidikan sampai tingkat SMA saja.

Calon ketiga adalah SU. SU ini bukan orang asing lagi bagi warga. Bahkan banyak sekali warga yang mengenal sosok beliau dan paham dengan latar belakang beliau. Beliau dikenal warga karena pribadinya yang sangat ramah. Beliau terkenal juga karena beliau merupakan mantan Bandar judi dan juga penyalang ayam di desa tersebut. Sebelum beliau menclonkan diri menjadi kepala desa SU sudah sangat dekat dengan warga. Hal itu terjadi ketika beliau masih menjadi penjudi

dan penyalang ayam. Saat itu beliau membangun keakrabannya dengan warga desa. Warga mengatakan bahwa SU memiliki kepribadian yang sangat loyal. Beliau sering berkumpul dengan warga hanya untuk minum kopi. Seringkali juga SU membelikan beberapa makanan untuk warga yang sedang berkumpul dengannya saat itu. Hal itulah yang kemudian warga menganggap bahwa SU merupakan calon yang dapat dengan mudah berbaur dengan warga dari kalangan manapun.

Calon Keempat adalah NI. NI merupakan calon yang cukup asing bagi warga. Namun, warga mengenalnya sebagai salah satu warga dusun Bogo. Namun, tidak banyak warga yang pernah berinteraksi dengannya. Bahkan warga juga kurang mengetahui bagaimana latar belakangnya. Warga hanya mengetahui ketika beliau melakukan kampanye saja. Sehingga tidak banyak informasi yang bisa digali terkait dengan latar belakang NI.

Kriteria Kepala Desa yang diinginkan oleh warga

Kriteria Kepala Desa merupakan keinginan yang diinginkan oleh masyarakat dengan berbagai patokan bagi calon Kepala Desa. Berdasarkan hasil temuan data bahwa calon Kepala Desa memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu, dalam pemilihan setiap calon akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat untuk memilihnya pada pemilihan umum. Setiap calon memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh informan, bahwa karakter yang dimiliki setiap calon dapat diketahui menurut kehidupan sehari-harinya. Kehidupan sehari-hari bersama masyarakat atau aktivitas yang sering di

lakukan bersama masyarakat dan adanya kontak komunikasi setiap harinya, masyarakat dapat menilai sendiri karakter dari masing-masing calon.

Calon Kepala Desa yang memiliki pendidikan tinggi tentu sangat diharapkan oleh masyarakat. Namun, di samping itu masyarakat lebih menilai cara bersikap dan bentuk kesehariannya. Kepribadian calon pemimpin ternyata juga menjadi penilaian penting dari masyarakat disamping pendidikan tinggi. Menurut Weber, bahwa cara terbaik untuk dapat memahami karakteristik seseorang atau kelompok dengan menghargai sikap berperilaku individual. Masyarakat Desa tersebut memahami karakteristik bakal calon Kepala Desa yang telah ia kenal sebelumnya, dalam aktivitas kemasyarakatan. Oleh karena itu, masyarakat dalam memilih memiliki kriteria-kriteria berbeda-beda untuk setiap calon.

Dari semua warga yang kami wawancara mereka menjawab bahwa seorang yang mereka inginkan menjadi seorang kepala desa adalah mereka yang memiliki pribadi yang ramah dan juga sangat merakyat. Selain itu, mereka juga menginginkan memiliki kepala desa yang berpendidikan yang tinggi. Hal ini dikarenakan pendidikan tinggi dapat memberikan perubahan bagi desa. Setidaknya dengan pendidikan tinggi yang dimiliki mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang masih belum mendapatkan pendidikan tinggi. Dari semua calon tersebut beberapa dari mereka memiliki karakter tersebut. Namun, ada kelebihan dan kekurangan pada calon. Pendapat tersebut disajikan dalam tabel 2.

Salah satu warga menyebutkan beliau menginginkan SN untuk menjadi kepala desanya.

Alasannya SN memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Dimana memang pendidikan tinggi juga menjadi nilai tinggi untuk masyarakat

dapat memilih. Pendidikan tinggi diharapkan mampu membawa desa ke arah yang lebih maju dan bisa membawa masyarakat melek teknologi.

“yang unggul ya bu SN, sekolahnya tinggi, ramah, kaya. Kalau pak SU lulusan SD kelas 4 lalu kejar paket. Beliau minta dukungan dari warga untuk menyetujuinya sebagai calon lurah. Namun beliau terpilih.”

Namun, ada kelemahan yang sangat mengganggu ketika akan memilih SN. SN dinilai beliau kurang merakyat. SN sebelumnya tidak banyak dikenal oleh warga. Beliau juga terlihat pilih-pilih ketika bergaul. Warga tersebut mengurungkan niatnya untuk memilih SN.

Sebaliknya ada SU yang memiliki karakter berbanding terbalik dengan SN. SU memiliki kepribadian yang sangat merakyat, ramah dan sangat dekat dengan warga. Namun, Pak Suwaji ini memiliki latar belakang pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Beliau putus sekolah saat kelas 4 SD. Ketika akan mencalonkan diri mejadi kepala desa beliau harus mengikuti program pendidikan kejar paket untuk mendapatkan ijazah agar dapat mencalonkan diri menjadi kepala desa. SU kemudian memenangkan kontestasi tersebut karena warga desa menyukai karakter beliau yang merakyat terlepas dari bagaimana latar belakang pendidikan beliau.

Bentuk Politik Uang Calon Kepala Desa

Warga tidak menampik adanya politik uang. Hampir semua calon kepala desa menggunakan politik uang. Sebagian besar warga menyambut baik hal tersebut. Bentuk politik uang kepala desa ini bisa beragam mulai dari uang hingga barang kebutuhan pokok. Menurut salah seorang warga bahwa masing – masing calon juga memiliki

Tabel 2. Kriteria Kepala Desa yang diinginkan Warga

No.	Nama Informan	Pekerjaan	Kriteria
1.	YA	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sikap yang ramah kepada semua warga desa • Memiliki sifat merakyat • Berpendidikan tinggi
2.	SI	Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sikap yang ramah kepada semua warga desa • Memiliki sifat merakyat • Berpendidikan tinggi
3.	TA	Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sikap yang ramah kepada semua warga desa • Memiliki sifat merakyat

Tabel 3. Bentuk Politik Uang

No.	Nama	Bentuk politik uang
1.	KN	<ul style="list-style-type: none"> • Masing – masing pemilih di- berikan uang. • Uang tambahan jika pemilih tersebut bersedia memilihnya
2.	SN	<ul style="list-style-type: none"> • Sembako • Kerudung • Uang senilai Rp. 50.000,00 • Pendukungnya mendapat tambahan uang senilai Rp. 200.000,00
3.	SU	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan uang kepada semua pemilih • Pendukungnya diberikan uang tambahan senilai Rp.100.000,00
4.	NI	<ul style="list-style-type: none"> • Sembako • Uang senilai Rp. 50.000,00

cara – caranya sendiri untuk membagikan politik uang tersebut. Ada calon yang memberikannya secara cuma – cuma dan ada juga calon yang akan memberikannya dengan syarat harus memilihnya. Bentuk politik uang tersebut dijabarkan dalam Tabel 3.

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa politik uang yang diberikan berupa uang maupun materi dengan jumlah yang berbeda-beda. Namun setiap calon kepala desa memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempengaruhi pilihan pemilih dan memperoleh suara.

Alasan Warga Memilih Menerima Politik Uang

Warga mengetahui dengan jelas dan secara terang – terangan bagaimana semua calon kepala desa tersebut namun mereka tidak menolak sama sekali adanya politik uang tersebut. Mereka justru menyambut baik hal tersebut. Seolah hal ini telah menjadi suatu kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Meskipun mereka mengetahui bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan namun, mereka tetap menerimanya dengan dalih bahwa tidak baik menolak rejeki. Dalih tersebut juga akan membawa pengaruh pada tindakan pemilih untuk membenarkan tindakannya dan tidak menjadikan suatu masalah. Hal ini menjadi suatu dalih yang menarik dan bisa dilihat bahwa bagaimana seorang individu bertindak dengan menggunakan rasionalitasnya.

Selain dari dalih tidak baik menolak rejeki juga terdapat anggapan dari warga bahwa untuk berangkat ke TPU harus ada uang sakunya terlebih dahulu. Dengan kata lain, masyarakat beranggapan harus ada ongkos untuk menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga para calon bisa menggunakan dalih tersebut ketika memberikan politik uang kepada pemilih. Seolah

mereka menuju ke TPU adalah proses meluangkan waktu, dan meluangkan waktu harus diberi imbalan serta. Pemilih pun menganggap bahwa uang yang diberikan merupakan uang saku tidak mengikat memilih siapa ketika nanti dia sudah di TPU.

Calon – calon kepala desa ini biasanya juga mendatangi rumah – rumah warga sendiri atau melalui perantara orang lain yang menjadi tim suksesnya di Pilkades. Calon kepala desa telah membentuk tim sukses agar mengetahui suara siapa saja yang mendukung atau mendominasi sebagai pemilih dirinya. Mendatang rumah warga seolah menjadi suatu hal yang memang wajib dilakukan oleh calon kepala desa, dengan kata lain atau dalih (blusukan) dengan memberi politik uang tersebut pada saat itu juga.

Motif Masyarakat Terkait Politik Uang Calon Kepala Desa

Politik uang dalam setiap pemilihan umum merupakan suatu hal yang wajar dan umum terjadi. Menurut Weber berdasarkan teori rasionalitas atau tindakan sosial bahwa pemilih dalam pilkades menggunakan caranya sendiri untuk memilih kepada desa tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang diterima pemilih. Karena setiap calon Kepala Desa memang memberikan kepada masyarakat yang memilihnya berbeda-beda. Semua calon memberikan dalam bentuk sejumlah uang dengan nominal yang berbeda dan dengan cara yang berbeda.

Perspektif dari sudut pandang masyarakat melihat adanya suatu fenomena politik uang umum terjadi, menurut masyarakat bahwa menolak rejeki pemberian orang merupakan tindakan yang tidak baik. Menengok teori yang di kemukakan oleh Weber yang tentang empat tindakan sosial yang

memiliki keterikatan dengan motif seseorang dalam bertindak. Maka pemilih akan menggunakan menggunakan hak suaranya secara rasional tanpa mengutamakan politik uang yang diterima. Berikut empat tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber terdapat dua tindakan yang ditemukan dalam penelitian. Pertama, tindakan tradisional adanya suatu tradisi dimana kebiasaan tersebut sudah ada sejak sebelumnya, bahwa apabila seseorang untuk datang ke TPU membutuhkan uang saku. Oleh karena itu, bakal calon menggunakan cara tersebut untuk menarik hati masyarakat. Kedua, tindakan rasional instrumental dimana masyarakat dalam memilih calon Kepala Desa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilihat berdasarkan karakteristik masing-masing calon dari kesehariannya

Pertama, tindakan tradisional dalam menganalisa hasil temuan data penelitian adalah dimana melihat suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan suatu kebiasaan yang terjadi setiap kali akan dilaksanakan pemilu di Desa Kedungjati. Suatu kebiasaan tersebut diwarisi dari setiap kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa setempat terdahulu. Oleh karena itu, kebiasaan tersebut diwarisi kepada bakal calon selanjutnya. Maka, masyarakat demikian juga mewarisi kebiasaan dimana dalam setiap diadakannya pemilu menerima uang atau suatu bentuk barang yang dianggap uang *sangu* untuk datang dan memberikan suaranya.

Kedua, tindakan afektif dengan berdasarkan emosional yang dimiliki seseorang dalam bertindak. Sikap tersebut memberikan pengaruh pada cara bersikap seseorang dalam pengambilan suatu keputusan. Sama halnya dengan masyarakat yang menjadi salah satu pelaku suatu tradisi akibat kebiasaan yang terjadi. Pemahaman masyarakat tentang politik uang bahwa suatu hal yang biasa terjadi.

Sementara, rasionalitas instrumental berkaitan dengan kesadaran terkait suatu tindakan oleh seseorang terhadap suatu kebiasaan yang dilakukan. Masyarakat Desa Kedungjati dalam pemahaman bahwa politik uang dalam pemilu merupakan suatu hal yang biasa terjadi, merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan rasional. Oleh karena itu, tradisi yang muncul akibat adanya kebiasaan dapat berjalan dan berkembang hingga saat ini.

Keempat, rasionalitas nilai suatu tindakan sosial yang berdasarkan nilai yang dapat diambil oleh masyarakat. Nilai dalam hasil temuan data

penelitian ini adalah tindakan pelaku tradisi para kandidat calon Kepala Desa dimana dalam keseharian memiliki aktivitas sosial yang tinggi, berinteraksi dengan banyak orang, dan memiliki relasi tidak hanya selingkup desa setempat.

Berdasarkan hasil temuan data pada penelitian ini, bahwa apabila jika dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat setempat. Hal tersebut diperoleh data, bahwa mata pencaharian sebagian masyarakat setempat adalah petani tanaman pangan. Namun, sebagian dari mereka juga pemilik dari lahan yang cukup luas sebagai media bercocok tanam. Masyarakat yang hanya sehari-hari mendapatkan penghasilan sebagai seorang petani, menjadi salah satu faktor bagi calon Kepala Desa agar mendapatkan perhatian dari masyarakat. Masyarakat merupakan aspek terpenting dalam Pemilihan Umum (pemilu), karena suara mereka menentukan bakal calon yang terpilih. Oleh karena itu, setiap diberlangsungkannya pemilu atau pesta rakyat tersebut kandidat pasangan calon memberikan sesuatu seperti uang, maupun barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Fenomena yang ada di Desa Kedungjati, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang terjadi pula di setiap hampir seluruhnya di Kabupaten maupun Kota. Sesuatu yang sudah menjadi suatu kebiasaan yang selalu dilakukan setiap kali adanya pemilu, dimana kebiasaan tersebut yang sering terjadi seolah menjadi sebuah tradisi. Kandidat Kepala Desa melakukan sesuatu berdasarkan apa yang telah menjadi sebuah kebiasaan dimana menurut Weber bahwa seseorang melakukan suatu tindakan sosial bukan hanya sekedar melakukan apa yang menjadi suatu kebiasaan tersebut, namun juga dapat memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat serta aktivitas masyarakat setiap harinya. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemikiran teori Weber, bahwa dalam temuan data dan analisis ini melihat motif dan tujuan masyarakat dalam mempertimbangan suatu hal yang memiliki pengaruh terhadap tindakan individu lain.

SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis data adalah tindakan warga Dusun Prayungan, Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh merupakan suatu tindakan yang didasarkan oleh tindakan tradisional dan tindakan rasional instrumental. Warga desa menerima politik uang tersebut secara sadar dan tanpa penolakan. Dari sisi warga mereka sudah mengetahui alasan calon kepala desa memberikan mereka uang

atau sembako. Mereka juga menerima uang atau sembako tersebut dengan tujuan yang timbal balik dengan calon kepala desa. Warga mengetahui uang dan sembako tersebut bertujuan untuk pemberian dukungan suara mereka kepada calon kepala desa. Dari sisi calon kepala desa mereka memberikan uang dan sembako tersebut dengan tujuan warga akan mendukung mereka ketika hari penentuan nanti. Praktik politik uang masih dianggap efektif untuk memperoleh suara.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa warga juga memiliki kriteria kepala desa. Oleh sebab itu pemilihan kepala Desa Kedungjati dimenangkan oleh Pak Suwaji, seseorang yang loyal dan dekat dengan masyarakat.

Politik uang merupakan hal yang erat dengan kontestasi politik mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan kepala desa. Maka untuk menekan politik uang dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penguatan keamanan. Warga perlu dijelaskan mengenai konsekuensi praktik politik uang. Konsekuensi ini datangnya bukan hanya dalam jangka pendek saja sesimpel memberikan uang dalam satu waktu. Konsekuensi ini akan berdampak pada jangka panjang semisal seperti melakukan korupsi dana desa atau dana lainnya. Hal ini dibuktikan dengan Selain itu dengan pernyataan ketua bawaslu “Politik uang setiap penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah momok yang harus dicegah, karena bisa mengarah pada perilaku korupsi,” petugas keamanan juga harus menjaga kondisi tetap steril agar tidak terjadi kecurangan dalam bentuk apapun termasuk dalam bentuk politik uang. Tidak di pungkiri uang merupakan alat tukar yang dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi dalam hal demokrasi diperlukan kesadaran. Penyadaran pada setiap sendi masyarakat mengenai politik uang ini harus benar-benar ditindaklanjuti oleh berbagai pihak dan media yang ada. Pihak yang paling berpengaruh pada tindakan seorang individu adalah keluarga, karena keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan sosialisasi khususnya pada pemilihan calon pemimpin daerah bahkan negara.

Dalam proses pemilihan kepala desa yang menggunakan politik uang sebagai sarana untuk memenangkan pemilihan dan masyarakat secara terang-terangan menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa terjadi maka dengan cepat atau lambat masyarakat akan kehilangan daya pikir kritisnya hanya dengan ditunjukan uang dengan nilai yang tidak banyak. Tradisi politik uang seperti

ini harus dikritisi mulai dari lingkup kecil, mulai dari sendiri sampai lingkup lingkungan, sehingga tradisi seperti ini tidak langgeng dan dibertahan dalam lingkungan masyarakat. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang dipilih oleh masyarakat secara sadar tanpa politik uang yang berasaskan pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terkait penyandang dana, pembimbing dan personil yang terkait langsung dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Y. (2015). Analisis Teori Tindakan Rasional Max Weber pada Fenomena Sunat Bagi Wanita di Daerah Indramayu Jawa Barat. Retrieved September 15, 2019, from blog.unnes.ac.id/yahya1/2015/11/17/analisis-teori-tindakan-rasional-max-weber-pada-fenomena-sunat-bagi-wanita-di-daerah-indramayu-jawa-barat/
- Agustin, R. S. (2018). Rasionalitas Pemilih Bupati Tulungagung Pada Pilkada Tahun 2018. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 1–6.
- Agustin, S. (2019). Pemkab Bogor Bahas Sanksi Politik Uang di Pilkades. *detikNews*, pp. 1–2. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4759494/pemkab-bogor-bahas-sanksi-politik-uang-di-pilkades?tag_from=news_cb_terbaru_list
- Amanu, M. (2015). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri).
- Ayuningtyas, R. (2019, April 16). Polri Tangani 22 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang, pp. 1–4. Retrieved from <https://www.liputan6.com/pileg/read/3944561/polri-tangani-22-kasus-politik-uang-selama-masa-tenang>
- Fauzi, A. M. (2018). *Politik Kebijakan Pemberantasan Korupsi*. (F. S. Sadewo & R. H. Listyani, Eds.). Surabaya: UNESA UNIVERSITY PRESS.
- Fauzi, A., Sudrajat, A., Affandi, A., & Raditya, A. (2018). Maintaining Identity Political Culture In Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 953.
- Fitriyah. (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati), 6(2), 101–111.
- Ismawan, I. (1999). *Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Liputan6.com. (2020). Bawaslu Ingatkan Waspada Politik Uang Jenis Baru di Pilkada 2020. *Liputan6.com*, pp. 6–7. Retrieved from <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4194337/bawaslu-ingatkan->

- waspada-politik-uang-jenis-baru-di-pilkada-2020
- Miles, M. ., & A.M., H. (2009). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (I). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mugiono, W. (2015). Perilaku Politik Warga Timbulharjo Dalam Pemilihan Lurah Desa Tahun 2013.
- Muhlis, A., & Norkholis. (2016). Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan kitab Mukhtashar Al-Bukhari. *Jurnal Living Hadis*, 1(2).
- Nadir. (2018). Membangun Pendidikan Politik Dalam Fatsun Demokrasi Pancasila Dan Deliberative, 3(1), 126–141. Retrieved from <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p126-141>
- Nuratika. (2015). Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah di Desa Ketapang Permai dan Desa Tanjung Kulim Kab Kepulauan Meranti tahun 2015, 4(2), 1–15.
- Siswandi. (2016). Persepsi Masyarakat terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cemaga Selatan Kec Bunguran Selatan Kab Natuna tahun 2013, 1–25.
- Sumartini, L. (2004). *Money Politics dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Syafií, M. (2019, April 16). Antisipasi 'Serangan Fajar', Desa di Jombang Pasang 15 CCTV. *KOMPAS.com*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/19220341/antisipasi-serangan-fajar-desa-di-jombang-pasang-15-cctv>
- Umam, A. K. (2006). *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.
- Umanailo, M. C. B. (2008). *Max weber*. Yogyakarta: Kencana.
- Wismabrata, M. H. (2019, April 16). 6 Fakta "Serangan Fajar" Sejumlah Oknum Caleg, Dimarahi Warga hingga Rampas Ponsel Petugas TPS. *KOMPAS.com*, pp. 4–8. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/14261971/6-fakta-serangan-fajar-sejumlah-oknum-caleg-dimarahi-warga-hingga-rampas?page=all>